

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan salah satu karakteristik universal yang dimiliki oleh masyarakat manusia. Konflik dapat terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi, perubahan sosial, pembentukan budaya, perkembangan psikologis, serta pembentukan organisasi-organisasi dari kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam perkembangannya, konflik bersifat dinamis. Sebab, konflik mengalami peningkatan (eskalasi) dan penurunan (de-eskalasi).¹

Salah satu bentuk konflik yang sering tampak pada saat ini adalah konflik internal atau konflik yang terjadi di dalam sebuah negara. Pada umumnya, konflik internal dipicu oleh konflik etnis, disebabkan oleh perbedaan etnis, budaya, yang nilai-nilai antara satu etnis dianggap berbenturan dengan nilai etnis lain. Berdasarkan bentuknya, konflik etnis ini bisa berbentuk horizontal, terjadi antar etnis atau agama di dalam sebuah negara; dan berbentuk vertikal, terjadi antara negara dengan kelompok etnis yang ada di dalamnya.² Di dalam kedua bentuk konflik etnis ini, pihak ketiga dapat dilibatkan. Keterlibatan pihak ketiga akan mempengaruhi perkembangan konflik itu sendiri dan memungkinkan konflik itu semakin memanas.³

¹ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, and Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2011), 7-8.

² Baiq L.S. Wardhani, "Kajian Etnis dalam Kajian Politik Global," Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. https://www.academia.edu/902452/Konflik_Etnis_dalam_Kajian_Politik_Global, (diakses pada 18 Mei 2015), 1.

³ Ramsbotham et al., 8.

Pada beberapa konflik etnis, sering kali kedua kelompok memiliki perbedaan agama yang diikutsertakan menjadi salah satu penyebab konflik. Hal tersebut biasanya menimbulkan konflik etnoreligius. Jonathan Fox menjelaskan bahwa konflik etnoreligius adalah konflik antara kelompok etnis yang memiliki perbedaan agama.⁴ Sementara itu menurut S. Ayse Kadayifci-Orellana, konflik etnoreligius merujuk kepada setiap konflik yang melibatkan pihak-pihak yang ditentukan oleh batas-batas agama, masyarakat dengan agama sebagai aspek yang sudah terintegrasi dengan kehidupan sosial dan budayanya, dan institusi agama yang mewakili secara signifikan suatu komunitas masyarakat dan memiliki legitimasi moral serta kapasitas untuk memobilisasi pengikutnya.⁵

Konflik etnoreligius bisa melanda kawasan mana saja. Namun, sering kali terjadi di dalam sebuah negara (*intra-state*) di mana terdapat masyarakat dengan agama dan budaya yang berbeda yang hidup di tempat yang sama.⁶ Tidak terkecuali di negara-negara Asia Tenggara, kawasan yang selama ini dianggap relatif stabil, konflik etnoreligius pun terjadi. Bahkan konflik etnoreligius di Asia Tenggara ini rawan memunculkan gerakan pemisahan diri atau separatis dalam setiap negara. Beberapa negara yang terlibat dalam konflik etnoreligius ini, diantaranya: Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Gerakan pemisahan diri ini menjelma dalam berbagai bentuk organisasi, mulai dari gerakan pemisahan diri, gerakan massa, maupun partai politik. Beberapa kelompok berbasis etnis dan agama di Asia Tenggara, diantaranya adalah: The Pattani United Liberation

⁴Jonathan Fox, *Ethnoreligious Conflict in The Late Twentieth Century: A General Theory* (Lanham: Lexington Books, 2002), 143.

⁵ S. Ayse Kadayifci-Orellana, "Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution," in *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, ed. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and Ira William Zartman (London: SAGE Publishing, 2009), 265.

⁶Ibid. 265.

Organization (PULO) di Thailand dan Moro Islam Liberation Front (MILF) di Filipina.⁷ Mereka dibedakan dengan kelompok berbasis etnis yang seagama dengan agama kelompok mayoritas seperti: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) di Malaysia. Namun pada umumnya, perjuangan dari kelompok pemisah diri ini sama-sama dianggap mengganggu stabilitas keamanan nasional dan regional. Munculnya gerakan pemisah diri ini menimbulkan paradoks sebuah negara dimana pada satu sisi pemerintah negara berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam satu kenegaraan, namun pada sisi lain kelompok-kelompok tertentu ingin membentuk sebuah pemerintahan sendiri.⁸

Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada konflik etnoreligius yang terjadi di Thailand. Masyarakat Thailand tergolong heterogen dari segi etnis dan agama. Mayoritas 70% penduduk Thailand adalah etnis Thai yang beragama Budha Therevada (sekitar 54 juta jiwa). Sedangkan sekitar 6 juta jiwa penduduk minoritas Thailand berasal dari etnis Melayu yang beragama Islam. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di Thailand. Pada umumnya, penduduk Muslim ini menghuni wilayah Thailand bagian selatan. Masyarakat Muslim-Melayu inilah yang menjadi subjek utama dalam konflik Thailand Selatan. Konflik tersebut berkaitan dengan persengketaan wilayah dengan perbedaan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan.⁹

⁷ Baiq L.S. Wardhani, "Iredentisme Islamis di Asia Tenggara Pasca 9/11: Identifikasi, Karakteristik dan respon pemerintah," Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, http://baiq-wardhani-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64327-Umum-Iredentisme%20Islam%20di%20Asia%20Tenggra.html (accessed Mei 19, 2015), 7.

⁸ Ibid., 8.

⁹ Ibid., 10.

Muslim di Thailand sebetulnya terdiri atas dua golongan besar, yaitu kaum Muslim Melayu yang bermukim di wilayah Thailand Selatan dan Muslim Thai yang bermukim di Thailand Tengah dan Thailand Utara. Antara Muslim Thai dan Muslim Melayu ini terdapat perbedaan yang signifikan. Masyarakat Muslim Thai lebih majemuk dibandingkan dengan Muslim Melayu. Mereka telah mengalami proses sosialisasi yang seragam melalui pendidikan, pasar, media, serta institusi-institusi politik dan sosial yang ada di Thailand. Muslim Thai juga telah banyak yang menerapkan kebudayaan Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan biasa menikah dengan orang-orang Thailand yang beragama Buddha.¹⁰

Secara administratif Muslim Melayu di Thailand terkonsentrasi di Thailand Selatan yang terdiri dari empat provinsi: Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhala. Sedangkan secara sosiologis-kultural masyarakat Muslim Melayu di Thailand merupakan kelompok minoritas yang berbeda dengan kelompok Thai pada umumnya. Adanya keterikatan sejarah yang kuat dengan Kelantan dan Kedah (Malaysia) menjadikan masyarakat Muslim Melayu di Thailand tetap menggunakan bahasa Melayu. Pada awal perkembangannya, Thailand dan Thailand Selatan memiliki hubungan yang baik yang ditunjukkan dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun, dalam proses asimilasi etnis Melayu Muslim ke dalam masyarakat Thailand yang dibentuk oleh pemerintah telah menciptakan kesenjangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kondisi yang seperti ini semakin diperburuk dengan keputusan pemerintah Thailand untuk menciptakan negara modern dengan ideologi Buddhisme dan Militerisme. Elit politik dan

¹⁰ Malik Ibrahim, "Seputar Gerakan Islam di Thailand: Suatu Upaya Melihat faktor Internal dan Eksternal," *Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 1 (Februari: 2012): 134.

sektor publik didominasi oleh etnis Thai baik itu di tingkat nasional maupun lokal. Kemudian, pemerintah Thailand meluncurkan kebijakan, bahwa dalam setiap sekolah sekuler diharuskan menggunakan bahasa Thailand. Akibatnya, masyarakat Muslim-Melayu semakin terpinggirkan.¹¹ Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tentu saja ditentang oleh masyarakat Muslim Melayu yang berada di Thailand Selatan. Satu per satu kelompok pemberontakan mulai bermunculan.

Kelompok pemberontakan yang muncul, diantaranya adalah: Kelompok Haji Sulong, Barisan Revolusi Nasional (BRN), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), dan The Pattani United Liberation Organization (PULO).¹² Mereka memiliki berbagai tuntutan seperti: pemberian otonomi terhadap Thailand Selatan; menjadikan Pattani sebagai bagian dari Federasi Tanah Melayu; atau menggabungkan Thailand Selatan dengan Indonesia. Namun, keinginan dari kelompok ini ditolak oleh pemerintah Thailand sehingga masyarakat Thailand mulai melakukan tindakan bersenjata, sehingga kerusuhan di Pattani pun tidak terelakkan.¹³

Pemberontakan yang mereka lakukan berbentuk kekerasan seperti upaya sabotase terhadap fasilitas infrastruktur milik pemerintah, penyerangan pusat-pusat komunikasi internasional, penyerangan pejabat pemerintah, penembakan

¹¹ John Fuston, *Thailand's Southern Fires : The Malaysian Factor*, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), (Canberra: Australian National University, 2006).

¹²Uthai Dulyakasem, "Muslim-Malay Separatism in Southern Thailand Factors Underlying the Political Revolt," in *Armed Separatism in Southeast Asia*, ed. Joo-Lock, Lim and Vani S.(Singapore: ISEAS,1984), quoted in Wardhani, *Iredentisme Islamis di Asia Tenggara*, 4.

¹³Ibid.,

guru, serta pengeboman jembatan, gedung-gedung pemerintahan, dan infrastruktur milik negara lainnya.¹⁴

Pada awal Januari 2004 beberapa insiden kerusuhan kembali melanda Thailand Selatan, terutama di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat. Insiden dimulai dengan penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Thak Bhai, Provinsi Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand serta hilangnya 300 senapan lengkap beserta amunisinya. Sejak peristiwa itu hingga pertengahan 2007, aksi kekerasan dan teror, pembunuhan, penculikan, dan peledakan bom terus-menerus mewarnai suasana di empat provinsi di Thailand Selatan yang mengakibatkan lebih dari dua ribu korban jiwa yang tewas.¹⁵ Sampai tahun 2014 konflik telah memakan korban sedikitnya 5.900 orang yang sebagian besar adalah warga sipil.¹⁶ Namun, hingga penelitian ini berlangsung, konflik di Thailand Selatan masih terjadi.

Upaya penyelesaian konflik Thailand Selatan bisa dikatakan tidak mudah. Kurangnya profesionalitas dan komitmen dari pemerintah Thailand, serta sikap pemerintah yang menolak melakukan negosiasi dan dialog yang intensif dengan kelompok pemberontak menjadi salah satu faktor yang memperparah hubungan antara kedua belah pihak. Terlebih lagi kepemimpinan dari pihak pemberontak

¹⁴Afif Futaqi, "Identitas Promordial: Konflik Thailand-Pattani, 2009," <https://www.scribd.com/doc/24286426/Identitas-Primordial-Konflik-Thailand-Patani>, (accessed April 8, 2015).

¹⁵Ibid.,

¹⁶Detik News, "Konflik Sektarian Thailand Renggut 5 Nyawa, termasuk Anak Kecil dan Biksu," *Detik.com*, February 12, 2014, <http://news.detik.com/read/2014/02/13/131001/2495927/1148/konflik-sektarian-thailand-renggut-5-nyawa-termasuk-anak-kecil-dan-biksu> (accessed Mei 17, 2015).

sendiri juga tidak jelas karena mereka terpolarisasi ke dalam beberapa kelompok.¹⁷

Upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan justru muncul dari organisasi internasional yang berbasis Islam, yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hal ini menjadi menarik, karena Thailand bukan merupakan negara anggota OKI dan juga bukan merupakan negara Islam. OKI merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OKI berprinsip pada keyakinan terhadap agama Islam, penghormatan terhadap Piagam PBB, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia universal. Dasar utama pembentukan OKI ini adalah untuk kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Salah satu mandat OKI sebagaimana yang tercantum dalam Piagam OKI adalah untuk melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat non-anggota.¹⁸ Piagam ini menyatakan bahwa OKI mengamanatkan Sekretariat Jenderal untuk menjamin hak-hak muslim minoritas dan masyarakat negara non-anggota. Dalam misinya OKI menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama sebagai elemen penting yang mengikat muslim secara bersama.¹⁹

OKI terbentuk setelah sejumlah pemimpin negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22-25 September 1969. Dalam konferensi tersebut, ditegaskan bahwa OKI berprinsip pada keyakinan terhadap

¹⁷ International Crisis Group, *Southern Thailand: Moving Towards Political Solutions?*, (Bangkok, International Crisis Group, 2009), 1.

¹⁸ Charter of the Organisation of the Islamic Conference.

¹⁹ Kementerian Luar Negeri, "Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id>, (accessed Agustus 18, 2015).

agama Islam, penghormatan terhadap piagam PBB dan hak asasi manusia. Dasar pembentukan OKI ini adalah untuk kepentingan umat Islam yang dapat dilihat dari awal pembentukannya. Pendirian OKI didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam terhadap masalah yang dihadapi oleh umat Islam dengan pembakaran Masjid al-Aqsa di Palestina oleh kelompok Zionis Israel pada tanggal 21 Agustus 1969 sebagai penyebab langsung pembentukannya. OKI memiliki beberapa tujuan konkret seperti: meningkatkan solidaritas Islam antar negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat suci Islam. Saat ini, OKI memiliki anggota 57 negara Islam yang mayoritas berasal dari Asia dan Afrika. Dalam perkembangannya, OKI menjadi salah satu wadah kerjasama di berbagai bidang, yaitu: ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara anggota OKI.²⁰

Terdapat dua alasan penulis mengapa OKI menjadi objek penelitian dalam resolusi konflik di Thailand Selatan. Pertama, berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti Malaysia dan Indonesia, OKI dinilai berhasil mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak. Hal ini sangat penting untuk kemajuan konflik di Thailand Selatan karena merupakan titik terang untuk mencegah konflik kekerasan di Thailand menjadi berlarut-larut. Pada tahun 2005, OKI mengutus kejadian di Tak Bai yang telah menewaskan ribuan korban dan mengecam pemerintah Thailand. Hal ini ternyata berhasil membuat Thailand merespon OKI dengan cara mengutus menteri luar negerinya saat itu, Dr. Nissai Vejjajiva, untuk menemui Kesekretariatan OKI. Tujuannya adalah untuk

²⁰Ibid.,

mengonfirmasi kejadian di Tak Bai dan menyatakan bahwa pemerintah Thailand telah membentuk komite independen atau yang disebut dengan “Komite Investigasi Independen” guna melanjutkan penyelidikan yang terjadi di Tak Bai. Selanjutnya, pada pertemuan tersebut OKI juga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Thailand untuk menuju perdamaian berkelanjutan. Dalam hal ini, OKI menyatakan kesiapannya untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Thailand Selatan.²¹

Pada tahun 2009, OKI berhasil mengundang Abu Yasir Fikri, pemimpin kelompok PULO untuk membahas kasus Thailand Selatan pada pertemuan OKI yang berlangsung di Jeddah.²² Setahun setelahnya, dalam sidang ke-37, OKI mengeluarkan resolusi No.1/37-MM untuk menjaga hak komunitas Muslim dan kaum minoritas di negara anggota OKI, khususnya membuat keputusan tentang masalah Thailand Selatan. Isi resolusi ini diantaranya adalah OKI membantu Thailand Selatan dalam mencari model pemerintahan yang sesuai dengan masyarakatnya, menekankan pada masalah pengakuan bahasa dan budaya Melayu, serta mendorong pembangunan ekonomi yang adil di Thailand Selatan.²³

Kedua, OKI memiliki prinsip dan mandat tersendiri yang mengharuskan mereka untuk terlibat di dalam konflik Thailand Selatan. OKI memiliki prinsip untuk melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat di negara non-anggota OKI, sebagaimana yang tercantum di dalam piagam OKI. Piagam ini menyatakan bahwa OKI mengamanatkan Sekretariat Jenderal untuk bekerjasama

²¹ Paoyee Waesahme, “The Organization of the Islamic Cooperation and the Conflict in Southern Thailand”(MIR thesis., Victoria university of Wellington, 2012), 48.

²²Pattani Post, “*Kerajaan Thai Meloby Negara OIC*,” *PattaniPost.com*, April 20, 2010, <http://patanipost.net/2010/04/20/kerajaan-thai-meloby-negara-oic/>, (accessed Mei 29, 2015).

²³Pattani Post, “*OIC Mahu Supaya Pihak Terlibat Mengadakan Perbincangan*,” *PattaniPost.com*, Mei 24, 2010<http://patanipost.net/2010/05/24/oic-mahu-sepaya-pihak-terlibat-mengadakan-perbincangan/> (accessed November 4, 2015).

dengan organisasi internasional lainnya untuk menjamin hak-hak minoritas muslim dan masyarakat negara non-anggota. Dalam misinya, OKI menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan berbagai intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama sebagai elemen penting yang mengikat muslim secara bersama-sama. Hal ini membuat OKI, baik diminta atau tidak, cenderung menjadikan prinsipnya sebagai pijakan untuk mengatasi persoalan minoritas Muslim bahkan di negara non-anggota.²⁴ Bahkan upaya OKI untuk melakukan pencegahan konflik dalam perkembangan selanjutnya didukung sepenuhnya oleh PBB dengan memperoleh mandat untuk bertindak sebagai pihak yang mencegah (*preventing*) terjadinya konflik kekerasan di negara anggota OKI maupun di negara non-anggota tetapi di sana terdapat komunitas umat Muslim yang memerlukan perhatian khusus dari OKI. Mandat OKI sebagai pencegah (*preventer*) tersebut telah disahkan melalui Resolusi No.61/49 oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2006.²⁵

PBB memutuskan OKI sebagai organisasi pengamat, menyambut upaya Sekretaris Jenderal OKI dalam memperkuat peran OKI dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*), menjaga perdamaian (*peacekeeping*), resolusi konflik (*conflict resolution*), dan rehabilitasi konflik di negara anggota serta konflik yang melibatkan masyarakat muslim. PBB dan OKI bekerjasama dalam mencari solusi untuk masalah global, seperti perdamaian dan keamanan internasional, pelucutan senjata, penentuan nasib sendiri, promosi damai kebudayaan melalui dialog dan

²⁴ Paoyee Waesahme, 20.

²⁵ UN Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by states parties under Article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights: concluding observations of the Human Rights Committee: Thailand, 8 July 2005, CCPR/CO/84/THA, quoted in Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand*, 7.

kerjasama, dekolonialisasi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, terorisme, bantuan darurat dan rehabilitasi, pembangunan sosial, ekonomi, dan teknis kerjasama.²⁶

Sebagai pihak yang menjalankan resolusi konflik, OKI memiliki mekanisme operasional tersendiri, diantaranya: Misi pencarian fakta dalam zona konflik, berpartisipasi dalam negosiasi diplomatik internasional, penugasan khusus OKI dan/atau grup kontak dengan kasus konflik, deklarasi publik dan laporan, memanfaatkan anggota OKI dalam organisasi internasional pada kasus tertentu dan memberikan layanan mediasi kepada pihak yang berkonflik.²⁷

Mandat dan prinsip OKI di atas sepenuhnya bekerja dalam konflik Thailand Selatan. Hal ini bahkan sudah dilakukan OKI sejak Juni 2005 dengan mengirimkan tim pencari fakta ke Thailand terkait dengan konflik kekerasan di sana. Pada Oktober 2005, Sekretaris Jenderal Ekmeleddin Ihsanoglu menegaskan bahwa OKI hadir karena mereka merasa perlu untuk terlibat di dalam konflik kekerasan yang berlarut-larut di Thailand Selatan.²⁸ Artinya, OKI bukan semata-mata menginginkan konflik berakhir, akan tetapi juga tidak menginginkan kekerasan terhadap Muslim terus terjadi di Thailand Selatan, mengingat dalam prinsip OKI, menjamin hak-hak Muslim di negara manapun, merupakan perhatian mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, konflik Thailand Selatan sejak tahun 2004 terus berada pada taraf eskalasi. Bahkan hingga tahun

²⁶ Resolusi PBB no 61/49

²⁷ Elizabeth H. Prodromou, "The OIC and Conflict Resolution" (Harvard University, 2014)., 3

²⁸ Neil J. Melvin, "Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency," *SIPRI Policy Paper* No. 20 (September 2007): 7.

2015 konflik ini telah menewaskan lebih dari 6.500 warga sipil. Pada tanggal 11 Juli 2015, serangan bom di tiga provinsi di selatan Thailand; Yala, Narathiwat, dan Songkhla masih saja terjadi dan telah menewaskan 6 orang.²⁹ Artinya aksi-aksi kekerasan di Thailand Selatan masih sering terjadi dan berpotensi tinggi untuk terus berulang. Bahkan apabila dibiarkan bukannya tidak mungkin akan menimbulkan perang dalam skala yang masif.

Di tengah berlangsungnya konflik tersebut, OKI tetap menunjukkan komitmennya untuk ambil bagian dalam upaya resolusi konflik. Terakhir OKI mengeluarkan resolusi pada pertemuan negara-negara anggota di Kuwait pada tanggal 27-28 Mei 2015 untuk terus menolak aksi-aksi kekerasan di Thailand Selatan.³⁰ Namun, persoalannya adalah OKI mencoba melakukan strategi resolusi konflik di Thailand yang bukan negara anggota maupun negara Islam. Sehingga menarik untuk dilihat bagaimana strategi resolusi konflik OKI di Thailand, apakah mampu konsisten dengan tujuan-tujuan mereka atau justru mengalami kendala-kendala tertentu.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah “*Bagaimana strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam konflik Thailand Selatan dengan menggunakan model Hourglass?*”

²⁹Reuters, “Six Killed and 11 Injured in Thailand’s Violence-hit South,” *Reuters.com*, July 11, 2015. <http://www.reuters.com/article/2015/07/11/us-thailand-blast-idUSKCN0PL0G420150711#CgmzdF5Uw0rLpxpk.97> , (accessed November 4, 2015).

³⁰Pattani Post, “OIC resolution about South Thailand,” *PattaniPost.com*, June 16, 2015. <http://patanipost.net/2015/06/16/oic-resolution-abouth-southen-thailand/> (accessed November 4, 2015).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh OKI dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari tulisan ini untuk para penstudi Hubungan Internasional lainnya adalah untuk memperkaya literatur mengenai proses, strategi, serta bentuk-bentuk intervensi kemanusiaan yang pernah diterapkan dalam penanganan kasus etnis seperti di Thailand Selatan.

1.6. Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa hasil karya orang lain yang terlebih dahulu meneliti tentang konflik Thailand Selatan maupun keterlibatan OKI di dalam studi pustaka.

Pertama, penulis menggunakan tulisan Malik Ibrahim dengan judul *Seputar Gerakan Islam di Thailand : Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal*. Dalam tulisannya ini, Malik menjelaskan aspek internal dan eksternal dari perkembangan Islam di Thailand. Dinamika Muslim Thailand tidak lepas dari aspek internal yaitu: pertama, adanya asimilasi ke dalam budaya Buddha-Siam yang dipaksakan oleh rezim Phibun Songgram pada tahun 1938. Kedua, terjadinya pembunuhan di Masjid Kru Se di Pattani dan Thak Bai di wilayah Menara pada tahun 2004 dan di Masjid al-Furqan di wilayah Menara pada tahun 2009 yang membuat umat Islam di Thailand tidak lagi memiliki tempat untuk

mengadu. Ketiga, militer yang mendominasi perpolitikan di Thailand sejak tahun 1932 hingga 1977 telah membuat aksi kekerasan terhadap muslim Pattani meningkat. Keempat, tidak adanya kesatuan di antara gerakan-gerakan perjuangan Muslim di Pattani. Sedangkan, pada aspek ekseternalnya Malik Ibrahim menyebutkan bahwa konflik di Pattani terus berlangsung karena kurang mendapat tempat bagi dunia internasional terutama PBB dan lembaga HAM meskipun konflik sudah terjadi sejak lama. Hal yang paling disayangkan menurut Ibrahim adalah OKI tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan untuk menghadapi konflik yang menimpa umat Muslim di Thailand Selatan tersebut.³¹

Kedua, penulis menggunakan laporan dari International Crisis Group dengan judul *Southern Thailand: Moving Towards Political Solutions?* yang menjelaskan konflik yang terjadi di Thailand Selatan pada tahun 2004. Kurangnya profesionalitas dari pemerintah serta sikap Thailand yang menolak melakukan negosiasi dengan kelompok pemberontak semakin memperparah hubungan antara kedua belah pihak. Para pihak fasilitator telah melakukan berbagai upaya, namun belum menemui hasil yang memuaskan. Upaya tersebut terhambat oleh kurangnya komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah serta kepemimpinan yang tidak jelas dari kelompok pemberontak. Salah satu contohnya adalah mediasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan pewartalannya Jusuf Kalla di Bogor. Namun upaya mediasi ini gagal setelah upaya mediasi ini bocor di media. Jika pemerintah menunjukkan komitmen yang serius dalam penyelesaian serius dalam dialog maka pemberontakan yang terjadi bisa dikontrol.³²

³¹ Malik Ibrahim, 147-151.

³²International Crisis Group, 16.

Crisis Group dalam kasus Thailand Selatan ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah Thailand. Pertama, mencabut keputusan darurat militer di tiga provinsi Thailand Selatan serta menguatkan *checks and balance* untuk menjaga kerusuhan kekuasaan disana. Kedua, mengadakan diskusi serius dengan perwakilan pemberontak yang membahas tentang struktur administratif khusus untuk Thailand Selatan. Ketiga, mengontrol peredaran senjata di dalam kelompok pemberontak maupun warga sipil. Keempat, meningkatkan partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kelima, menghentikan penyiksaan terhadap kelompok pemberontak. Dan yang terakhir mempercepat penyelidikan dalam penyerangan Masjid Al-Furqan.³³

Ketiga, penulis menggunakan tulisan Zachri Abuza yang berjudul *The Ongoing Insurgency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counter insurgency Operations, and the Impact of National Politics*. Tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, Zachri Abuza juga membahas tentang konflik kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan. Namun, ia berkonsentrasi kepada peristiwa dari tahun 2004 hingga tahun 2011. Sejak tahun 2004, pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok muslim melayu Thailand Selatan telah menewaskan sedikitnya 4.500 orang dan 9.000 orang luka-luka, sehingga konflik yang terjadi di Thailand saat ini merupakan konflik yang mematikan di Asia Tenggara. Sampai pada tahun 2011, konflik masih mengalami kebuntuan. Dari tahun 2004 hingga pertengahan awal tahun 2007, konflik mengalami penurunan. Namun, pada pertengahan akhir tahun 2007 konflik mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2008. Rata-rata perbulannya masyarakat meninggal 32

³³ Ibid., ii.

orang dan 58 orang terluka. Kebanyakan korban berjatuh akibat serangan tembakan dan alat peledak (IED). Pemberontak menargetkan sasarannya kepada pemerintah, pasukan keamanan negara, serta Muslim Thailand yang telah bercampur dengan Buddha.³⁴

Konflik Thailand Selatan terkadang tidak begitu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, sebab pemerintah hanya berfokus kepada politik nasional dan juga birokrasi Thailand yang kacau. Akibatnya kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan akan sulit untuk diselesaikan.³⁵

Keempat, penulis menggunakan tulisan Ibrahim Sharqieh yang berjudul *Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflict*. Dalam tulisan ini, Sharqieh membahas potensi yang dimiliki OKI dalam melaksanakan resolusi konflik di dunia Islam. Meskipun belum sepenuhnya berpengaruh besar terhadap perubahan konflik, OKI tetap melakukan berbagai upaya agar konflik yang terjadi dalam dunia Islam sedikit mereda. Hal itu bisa dilihat dari peranan OKI dalam empat negara yang pernah dibantu oleh OKI, diantaranya Filipina, Thailand, Somalia, dan Irak.³⁶

Konflik yang terjadi di Filipina dimulai pada saat kemerdekaan tahun 1964, yang mana komunitas muslim di negara tersebut menyerukan pembentukan negara sendiri, terpisah dari pemerintahan Filipina. Sehingga pada tahun 1970 menjadi konflik kekerasan dan mulai bermunculan kelompok pemberontakan, diantaranya *Moro National Liberation Front (MNLF)*. Dalam konflik ini, OKI

³⁴ Zachri Abuza, *The Ongoing Insurgency in Southern Thailand : Trends in Violence, Counterinsurgency Operations, and the Impact of International Politics* (Washington. D.C.: National defense University Press, 2011), 3-4.

³⁵ Ibid.,14.

³⁶ Ibrahim Sharqieh, "Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflict?" *Peace and Conflict Studies*, Vol. 19, No. 2, (Fall: 2012): 163.

melakukan intervensinya mulai pada tahun 1972. Kemudian, pada tahun 1974 OKI menyerukan agar MNLF dan pemerintah Filipina melakukan negosiasi dan mencari solusi damai untuk menjaga integritas wilayah Filipina. Melalui upaya mediasi intensif yang dilakukannya, OKI mampu membawa MNLF dan Pemerintah melaksanakan perjanjian damai pada tahun 1996 yang mana dalam perjanjian ini menunjuk pemimpin umum MNLF, Nur Misuari sebagai gubernur Filipina Selatan. Namun, DPR tidak meratifikasi kebijakan tersebut hingga terjadi lagi konflik baru. Hal ini menyebabkan OKI terlibat lagi dalam proses mediasi antara pemerintah dan MNLF hingga pada akhirnya OKI memulai kembali proses perdamaian dengan pencarian fakta baru.³⁷

Konflik selanjutnya, yaitu di Thailand. Konflik yang berkonsentrasi kepada empat provinsi Thailand bagian Selatan, yaitu: Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun dimana terjadinya diskriminasi muslim melayu oleh pemerintah Thailand. Puncak permasalahannya dimulai pada tahun 2004 ketika terjadi baku tembak antara tentara dan kelompok pemberontak. Melihat kasus ini, OKI ikut membantu menengahi konflik pada tahun 2005 setelah mendapat undangan dari pemerintah Thailand. Fokus utama OKI dalam konflik ini adalah mediasi. Upaya ini difokuskan kepada pemberian hak-hak muslim di Thailand Selatan dan juga sebagai bagian dari negara Thailand. Kemudian OKI membantu menyelesaikan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat Thailand Selatan dengan membentuk dialog, pemahaman, dan resolusi.³⁸

Kemudian terjadinya krisis kemanusiaan di Somalia pada tahun 1991 seperti perang saudara, kekeringan, serta kelaparan sehingga banyak menelan

³⁷ Ibid., 164-166.

³⁸ Ibid., 166-167.

korban jiwa. Dalam hal ini, OKI mencoba untuk ikut turun tangan dengan membentuk kelompok Kontak. Namun sayangnya, dalam perkembangannya konflik di Somalia menyebabkan Kelompok Kontak ini menjadi tidak efisien yang pada akhirnya menemukan jalan buntu. Namun kemudian, pada tahun 2006 OKI ikut berpartisipasi dalam upaya negosiasi antara Pemerintah Transisi Federal Somalia dengan Aliansi Pembebasan Somalia sehingga terbentuk Perjanjian Djibouti hingga kelompok Kontak menjadi aktif kembali.³⁹

Konflik yang terakhir yaitu di Irak. Terjadinya kerusuhan pada tahun 2003 serta pengeboman dua mesjid pada tahun 2006 memicu intervensi dari pihak ketiga, terutama OKI. OKI mencoba memberikan tempat untuk melakukan rekonsiliasi sehingga intervensi yang dilakukan oleh OKI dianggap sukses terutama dalam pencapaian “perdamaian sosial”. Beberapa contoh di atas menjelaskan bagaimana keterlibatan OKI sebagai mediator konflik.⁴⁰

Terdapat tiga faktor utama yang membuat pendekatan OKI menjadi lebih efektif. Pertama, pada saat organisasi lain seperti PBB melakukan mediasi dengan kekuatan (*force*), OKI mengambil peran sebagai pelengkap dalam mediasi tersebut. Kedua, pihak yang menginginkan OKI sebagai mediator terlaksana secara suka rela, sehingga mendapatkan respon yang baik dari pihak yang berkonflik. Dan yang ketiga, OKI melakukan pendekatan moral kepada pihak yang berkonflik. Selanjutnya, dalam kemitraannya dengan PBB, OKI menjadi salah satu agen resolusi konflik yang disahkan oleh Majelis Umum PBB, khususnya di negara-negara muslim.⁴¹

³⁹ Ibid., 168-169.

⁴⁰ Ibid., 169-170.

⁴¹ Ibid., 171-172.

Kelima, penulis menggunakan tulisan Shahid Ahmad Hashmat dengan judul *The OIC Potential, Capabilities and Constraints for International conflict Resolution*. Tulisan tersebut tidak jauh berbeda dengan sumber sebelumnya yang menjelaskan tentang kemitraan OKI dengan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Negara-negara anggota OKI memberikan dukungan penuh terhadap berbagai operasi penjaga perdamaian dunia. Beberapa tahun terakhir hampir setengah dari pasukan OKI diberikan untuk pasukan perdamaian PBB. Menariknya, hampir dari setengah kekuatan ini disediakan oleh dua anggota OKI, yaitu: Bangladesh dan Pakistan.⁴²

Dalam pelaksanaan resolusi konflik, OKI juga mengalami beberapa kendala. Kendala ini terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kendala yang berkaitan dengan masalah organisasi. Sejak tahun 1969, OKI merupakan sebuah Organisasi negara-negara Islam. Namun sayangnya, OKI tidak memiliki kerangka organisasi untuk menjadi perwakilan sejati dunia Muslim dan OKI juga bukanlah organisasi politik yang terstruktur sehingga tidak memiliki mandat dalam membuat keputusan yang mengikat. Kedua, kemampuan politik-militer yang masih minim diantara negara-negara OKI. Dan yang ketiga adalah kendala sumber daya pendapatan negara masing-masing anggota. Hanya sebagian kecil negara anggota yang hanya memiliki PDB per kapita tinggi, sedangkan negara anggota yang lainnya memiliki PDB per kapita yang rendah. Meskipun peran OKI dalam resolusi konflik terbatas, namun banyak negara-negara anggota OKI yang memberikan kontribusi

⁴² Shahis Ahmad Hashmat, *The OIC's Potential, Capabilities and Constraints for International Conflict Resolution*. (Islamabad: Institute of Strategic Studies Islamabad, 2014), 117-118.

yang positif dalam upaya PBB melaksanakan resolusi konflik internasional dengan aktif berpartisipasi dalam operasi penjagaan perdamaian PBB.⁴³

Dari kelima tulisan yang dijadikan bahan studi pustaka di atas, hal yang membedakannya dengan penelitian yang sedang penulis kaji adalah pada upaya memetakan atau membingkai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OKI dalam konteks penyelesaian atau resolusi konflik dalam sebuah model resolusi konflik. Dengan kata lain, di sini berusaha untuk memahami apa saja yang sudah dilakukan oleh OKI di Thailand Selatan dilihat dari model resolusi konflik yang diajukan, yaitu Model Hourglass dari Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall dkk., yang akan dipaparkan selanjutnya.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Definisi Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat manusia yang dapat terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi, perubahan sosial, pembentukan budaya, perkembangan psikologis, serta pembentukan organisasi dari kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam perkembangannya, konflik bersifat dinamis karena mengalami peningkatan (eskalasi) dan penurunan (de-eskalasi). Tidak jarang juga konflik diintervensi oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi perkembangan konflik dan memungkinkan konflik menjadi semakin meluas. Menurut Morton Deutsch, konflik pada dasarnya memiliki sifat merusak (*destructive*) dan membangun (*constructive*). Bagi Deutsch, hal tersebut

⁴³ Ibid., 119-123.

merupakan kunci utama dalam memahami Resolusi Konflik secara keseluruhan.⁴⁴ Sedangkan menurut Ramsbotham, dkk., konflik adalah pengejaran (*pursuit*) tujuan-tujuan yang berseberangan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika pihak yang saling berseberangan tersebut telah mengambil jalan menggunakan kekuatan paksaan (*force*) maka hal itu sudah termasuk konflik bersenjata (*armed conflict*). Ketika salah satu pihak menggunakan kekerasan untuk melawan pihak yang tidak bersenjata, maka itu sudah disebut dengan konflik kekerasan (*violent conflict*).⁴⁵

Setiap konflik tentunya membutuhkan suatu penyelesaian atau resolusi konflik. Menurut Ramsbotham, dkk., resolusi konflik merupakan suatu proses panjang agar bentuk konflik berubah atau terjadi transformasi yang belum bisa dikatakan selesai dengan hanya menghasilkan suatu kesepakatan (*agreement*) tapi juga harus menuju perubahan kondisi yang konstruktif. Artinya, resolusi konflik tidak hanya upaya untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi lebih jauh dari itu, resolusi konflik berarti menstruktur ulang atau mentransformasi hubungan pihak-pihak yang berkonflik.⁴⁶ Resolusi konflik bertujuan untuk mengubah perilaku pihak yang berkonflik untuk tidak lagi menempuh cara-cara kekerasan untuk mengejar tujuan, mengubah kebiasaan mereka yang sering bermusuhan kepada kondisi yang dapat saling memahami, serta mengubah struktur hubungan dari pihak-pihak yang berkonflik dimana tidak ada lagi kesenjangan atau diskriminasi.⁴⁷

⁴⁴ Ramsbotham et al., 7-8.

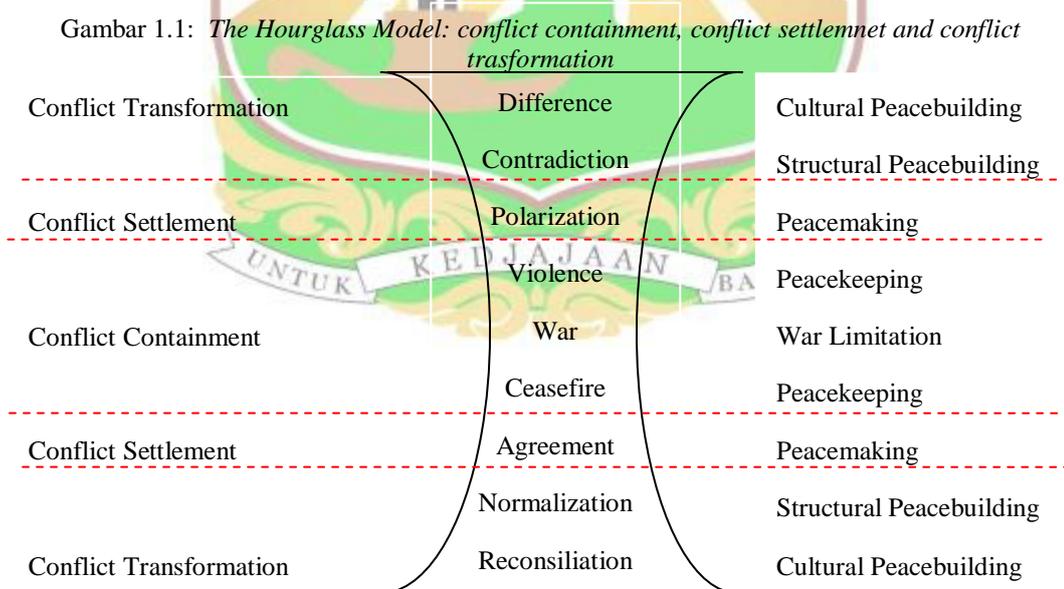
⁴⁵ Ibid., 30-31.

⁴⁶ Ibid., 9.

⁴⁷ Ibid., 31.

1.7.2. Model Respons Resolusi Konflik *Hourglass*

Terdapat berbagai macam model resolusi konflik yang ditawarkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Model Respons Resolusi Konflik Hourglass (selanjutnya disebut Model Hourglass) yang dirumuskan oleh Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall di dalam buku mereka *Contemporary Conflict Resolution* (2012). Model ini menggambarkan respon-respon yang dilakukan oleh pihak yang melakukan resolusi konflik pada fase-fase konflik, baik eskalasi maupun de-eskalasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Model Hourglass untuk menelaah strategi resolusi konflik yang dilakukan OKI dalam artian respons-respons strategis seperti apa yang diberikan oleh organisasi tersebut ketika bertindak sebagai pihak ketiga dalam konflik Thailand Selatan. Gambar 1.1. menunjukkan bentuk Model Hourglass yang sudah dirumuskan oleh Ramsbotham, dkk.



Sumber : Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall, *Contemporary Conflict resolution: The Prevention, Mangement and Transformation of Deadly Conflict*. 2012

⁴⁸Ibid., 13.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai Model Hourglass, berdasarkan penjelasan di dalam buku *Contemporary Conflict Resolution*, penulis mencoba memaparkan keterhubungan antara tiga kolom di dalam Model Hourglass. Baik itu antara kolom pertama dengan kolom kedua, kolom pertama dengan kolom ketiga, dan kolom kedua dengan kolom ketiga. Adapun yang penulis maksud dengan kolom pertama berada pada sisi kiri model, yaitu *conflict transformation*, *conflict settlement*, dan *conflict containment*. Kolom kedua berada pada bagian tengah, yaitu *difference*, *contradiction*, *polarization*, *violence*, *war*, *ceasefire*, *agreement*, *normalization*, dan *reconciliation*. Sedangkan kolom ketiga berada pada bagian kanan model yaitu *cultural peacebuilding*, *structural peacebuilding*, *peacemaking*, dan *peacekeeping*.

Ramsbotham dkk., memaparkan bahwa model yang mereka susun disebut juga dengan model mengenai kontingensi dan komplementaritas.⁴⁹ Kontingensi merujuk kepada sifat dasar dan fase konflik. Sedangkan komplementaritas merujuk kepada kombinasi respon-respon yang tepat yang dikerjakan secara bersama-sama untuk memaksimalkan kesempatan keberhasilan dalam resolusi konflik.⁵⁰ Apabila pengertian ini dibawa ke dalam model, kontingensi atau kemungkinan merujuk kepada kolom kedua model atau fase konflik. Hal ini didukung sendiri oleh Ramsbotham yang menyatakan bahwa baik eskalasi maupun de-eskalasi dalam fase konflik adalah sesuatu yang tidak terprediksikan.⁵¹ Sedangkan komplementaritas jelas merujuk kepada kolom pertama model. Keterhubungan antara kolom pertama dengan kolom kedua pun menjadi tergambar yang mana pada setiap fase konflik (kolom kedua) yang tidak

⁴⁹ [. . . this is a *contingency* and *complementarity* model . . .] Oliver Ramsbotham et.al., 13.

⁵⁰ Ibid., 13-14.

⁵¹ Ibid., 12-13.

terprediksikan diharapkan ada respon-respon tertentu (kolom pertama) dari pihak yang melakukan upaya resolusi konflik yang dapat memberi kesempatan keberhasilan pada resolusi konflik tersebut.

Fase konflik di dalam Model Hourglass terdiri dari fase eskalasi dan de-eskalasi. Fase eskalasi dimulai dari tahap *difference* hingga *violence*. Sedangkan fase de-eskalasi dimulai dari tahap *ceasefire* hingga *reconciliation*. Di antara kedua fase tersebut terdapat fase *war*. Ramsbotham dkk., tidak memberikan definisi tegas untuk setiap tahapan. Namun, menurut Ramsbotham, tahap *difference* sebetulnya adalah bagian dari setiap perkembangan sosial. Kemudian, tahap ini melewati tahap selanjutnya yaitu kemunculan *contradiction* yang dapat bersifat tersembunyi maupun tidak.⁵² Ramsbotham meminjam istilah *contradiction* dari Galtung yang didefinisikan sebagai situasi ketika adanya ketidakcocokan tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketidakcocokan ini dapat disebabkan oleh tidak sepadannya nilai-nilai sosial dan struktur sosial dalam suatu masyarakat.⁵³ Definisi ini akhirnya membantu menggambarkan apa yang dimaksud dengan *difference* itu sendiri yaitu perbedaan di dalam masyarakat, baik itu perbedaan nilai maupun perbedaan struktur.

Pada dua tahap pertama, konflik tidak begitu tampak di permukaan. Namun, pada tahap ketiga, konflik menjadi lebih jelas dan kelompok-kelompok musuh pun terbentuk. Tahap ini disebut dengan *polarization*. Puncaknya adalah ketika *violence* dan *war* terjadi.⁵⁴ Ada penjelasan tegas tentang apa yang disebut dengan konflik kekerasan (*violence conflict*). Konflik kekerasan kadang disebut juga dengan konflik mematikan (*deadly conflict*) atau konflik bersenjata (*armed*

⁵² Ibid., 13.

⁵³ Ibid., 10.

⁵⁴ Ibid., 13.

conflict). Konflik bersenjata meliputi serangkaian situasi mulai dari penerbangan militer di atas teritorial negara lain (*military overflight*) atau serangan tunggal terhadap penduduk sipil oleh seorang prajurit militer, hingga perang total dengan korban yang masif.⁵⁵

Setelah perang berakhir, konflik mulai memasuki fase de-eskalasi. Penandanya adalah adanya gencatan senjata (*ceasefire*) yang diikuti oleh tercapainya kesepakatan (*agreement*) dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketika dua tahap ini terlewati, maka tahap selanjutnya adalah normalisasi (*normalization*). Normalisasi terjadi pada kondisi pasca perang yang tampak ketika suatu negara memiliki kapasitas untuk melakukan atau mewujudkan hal-hal berikut: mensipilkan politik, keamanan bermasyarakat, budaya kekerasan yang sudah bertransformasi, pengadilan dan polisi yang tidak lagi dipolitisasi, respek terhadap hak-hak individu dan minoritas, penurunan kejahatan yang terorganisir, pemindahan kekuasaan yang damai lewat pemilu yang demokratis, pembangunan masyarakat madani dalam komunitas politik yang terjamin, integrasi yang patut antara politik lokal dan nasional, pembangunan dalam kepentingan warga negara dari semua latar belakang dalam jangka panjang, depolitisasi divisi-divisi sosial, penyembuhan luka psikologis, progres terhadap kesetaraan gender, pendidikan rekonsiliasi jangka panjang, integrasi menuju struktur regional/global yang kooperatif dan pantas.⁵⁶ Sedangkan fase terakhir, rekonsiliasi (*reconciliation*) didefinisikan sebagai pengembalian hubungan yang terputus dan belajar untuk hidup tanpa kekerasan dengan menerima bentuk-bentuk perbedaan (*differences*).⁵⁷

⁵⁵ Ibid., 31.

⁵⁶ Ibid., 222.

⁵⁷ Ibid., 246.

Dilihat dari data-data yang ditemukan, konflik di Thailand Selatan berada pada fase eskalasi dalam Model Hourglass. Lebih tepatnya berada pada tahap kekerasan (*violence*). Namun, karena konflik kekerasan merentang mulai dari kekerasan oleh satu orang bersenjata terhadap warga sipil hingga perang total, yang hanya dibedakan berdasarkan besarnya jumlah korban, perlu diperjelas apakah konflik Thailand Selatan berada pada tahap kekerasan atau sudah memasuki perang. Dilihat dari jumlah korbannya, sejak 2004 hingga 2015 konflik sudah menewaskan lebih dari 6.500 orang, peneliti menggolongkan konflik Thailand Selatan berada pada tahap *violence*.

Ramsbotham menghimpun data konflik bersenjata yang masih berlangsung hingga tahun 2008-2009 dari situs www.systemicpeace.org dan belum menempatkan konflik Thailand Selatan pada tahap perang.⁵⁸ Dari 2014 hingga sekarang, situs tersebut masih mengategorikan konflik Thailand Selatan pada tahap kekerasan (*violence*).⁵⁹ Kolonel Patcharawat Thnaprarnsing dari Royal Thai Army juga mengidentifikasi konflik Thailand Selatan pada tahap kekerasan.⁶⁰ Oleh karena itu, elemen-elemen Model Hourglass yang digunakan di dalam analisis adalah yang terkait dengan fase konflik dari *difference* hingga *violence* semata.

Dalam Model Hourglass, fase konflik pada kolom kedua mempengaruhi bentuk respons apa yang dilakukan oleh pihak yang tengah mengupayakan resolusi konflik. Bentuk respons ini terdapat pada kolom pertama dan ketiga.

⁵⁸ Ibid., 68.

⁵⁹ Monty G. Marshall, Center for Systemic Peace, "Major Episodes of Political Violence 1946-2014," Systemicpeace.org, <http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm#> (diakses pada 19 April 2016).

⁶⁰ Patcharawat Thnaprarnsing, "Solving the Conflict in Southern Thailand," (Strategy Research Project, Royal Thai Army, 2009), 1.

Kolom pertama dan ketiga memiliki keterhubungan yang kuat. Ada tiga komponen di dalam kolom pertama, yaitu *conflict transformation*, *conflict settlement*, dan *conflict containment*. *Conflict transformation* merujuk pada transformasi mendalam dalam institusi-institusi dan wacana-wacana yang mereproduksi kekerasan, maupun transformasi mendalam dalam pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri serta hubungannya satu sama lain.⁶¹ *Conflict transformation* ini meliputi respons *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding* yang terdapat pada kolom ketiga.⁶²

Conflict settlement merujuk pada pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat mencegah atau mengakhiri konflik bersenjata.⁶³ Keterhubungannya dengan kolom ketiga Model Hourglass adalah bahwa *conflict settlement* dapat disamakan dengan *peacemaking* dalam kolom ketiga yang bentuk konkretnya adalah negosiasi atau mediasi pihak-pihak yang berkonflik agar tercapai kesepakatan.⁶⁴ Sedangkan komponen terakhir kolom pertama Model Hourglass adalah *conflict containment* meliputi *peacekeeping* dan *war limitation*. *Peacekeeping* dimaknai oleh Ramsbotham dengan dua cara: penempatan pasukan bersenjata internasional untuk memisahkan pihak yang berkonflik; dan melakukan tugas-tugas sipil seperti memonitor, menjaga ketertiban, dan menyokong intervensi kemanusiaan.⁶⁵ Sedangkan *war limitation* dapat berupa pembatasan perang secara geografis, peringatan dan pengurangan intensitas perang.⁶⁶ Kedua komponen tersebut, *peacemaking* dan *war limitation*

⁶¹ Oliver Ramsbotham., 31-32.

⁶² Ibid., 14.

⁶³ Ibid., 31.

⁶⁴ Ibid., 14.

⁶⁵ Ibid., 32.

⁶⁶ Ibid., 31.

berada pada kolom ketiga Model Hourglass. Dengan demikian keterhubungan antara kolom pertama dengan kolom ketiga adalah keduanya merupakan pekerjaan komplementaritas atau saling melengkapi.

Selanjutnya adalah keterhubungan antara kolom kedua dengan kolom ketiga Model Hourglass. Ramsbotham melebeli kolom kedua dengan tahap konflik (*stage of conflicts*), sedangkan kolom ketiga adalah respon strategis (*strategic response*) yang dilakukan bergantung pada tahap konflik.⁶⁷ Oleh karena konflik Thailand Selatan berada pada tahap kekerasan, maka respons strategis yang dijadikan alat analisis untuk melihat strategi resolusi konflik OKI adalah yang berkorelasi dengan tahap konflik dari *difference* hingga *violence* saja. Adapun responsnya adalah *cultural peacebuilding*, *structural peacebuilding*, *elite peacemaking*, dan *peacekeeping*.

Untuk memahami respons strategis dari *difference* hingga *violence* tersebut, Ramsbotham memberikan contoh-contoh konkret yang peneliti jadikan sebagai indikator untuk melihat OKI. *Cultural peacebuilding* dilakukan dalam bentuk misi pencarian fakta (*fact finding missions*). Apakah OKI melakukan misi pencarian fakta atau tidak, akan menjadi alat ukur untuk menentukan bagaimana respons OKI untuk memahami *difference* antara pihak-pihak yang berkonflik di Thailand Selatan. Kemudian, *structural peacebuilding* yang dilakukan dalam bentuk pembangunan masyarakat sipil (*civil society development*). Ada atau tidaknya OKI membantu pembangunan masyarakat di Thailand Selatan akan menjadi ukuran untuk menentukan seperti apa respons OKI ketika melihat *contradiction* yang ada di Thailand Selatan. Selanjutnya, *elite peacemaking*

⁶⁷ Ibid., 16.

dilakukan dengan mengirimkan duta khusus dan mediasi resmi (*special envoys and official mediation*) dan melakukan negosiasi (*negotiation*). Di sini akan dilihat, apakah OKI ada mengirimkan duta khusus ke Thailand Selatan, melakukan mediasi resmi, serta bernegosiasi dengan pihak Pemerintah Thailand maupun Kelompok Pemberontak. Hal ini akan menjadi ukuran dalam melihat respons OKI ketika memahami *polarization* yang terjadi di Thailand Selatan. Terakhir, *peacekeeping* dilakukan dengan manajemen dan pengurangan krisis (*crisis management and containment*). Hal ini berguna untuk melihat bagaimana OKI melihat kondisi *violence* di Thailand Selatan.⁶⁸

Ramsbotham menjelaskan bahwa resolusi konflik pada setengah bagian atas dari Model Hourglass –dari *difference* hingga awal *violence* –ditujukan untuk mencegah konflik kekerasan (*preventing violent conflict*).⁶⁹ Keterhubungan Model Hourglass dengan *preventing violent conflict* serta operasionalisasinya untuk melihat strategi resolusi konflik OKI di Thailand Selatan akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

1.7.3. Preventing Violence Conflict

Berdasarkan Model Hourglass, fase konflik dari tahap *difference* hingga tahap *violence* merupakan fase eskalasi konflik yang idealnya direspon oleh pihak yang melakukan resolusi konflik lewat serangkaian tindakan mulai dari *cultural peacebuilding*, *structural peacebuilding*, *peacemaking*, dan *peacekeeping*. Tujuan tindakan-tindakan tersebut adalah untuk pencegahan konflik kekerasan

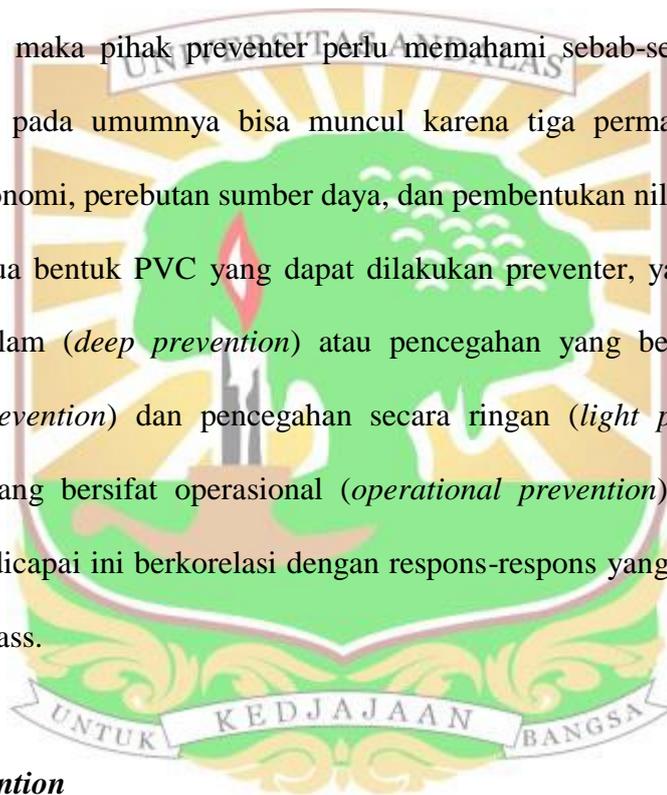
⁶⁸ Ibid., 16.

⁶⁹ Ibid., 15 dan 123.

(*preventing violent conflict*). Pihak yang melakukannya kemudian disebut dengan *preventer*.

Menurut Ramsbotham dkk., *Preventing violence conflict* (PVC) merupakan tujuan dilakukannya resolusi konflik pada tahap awal.⁷⁰ Prinsipnya adalah mencegah konflik bersenjata agar tidak meluas menjadi konflik bersenjata yang baru. PVC bukan dimaksudkan untuk menghindari konflik secara keseluruhan, melainkan untuk menghindari meluasnya konflik kekerasan.⁷¹ Agar PVC tercapai, maka pihak preventer perlu memahami sebab-sebab munculnya konflik, yang pada umumnya bisa muncul karena tiga permasalahan utama: perubahan ekonomi, perebutan sumber daya, dan pembentukan nilai-nilai baru.⁷²

Ada dua bentuk PVC yang dapat dilakukan preventer, yaitu pencegahan secara mendalam (*deep prevention*) atau pencegahan yang bersifat struktural (*structural prevention*) dan pencegahan secara ringan (*light prevention*) atau pencegahan yang bersifat operasional (*operational prevention*).⁷³ Dua sasaran yang hendak dicapai ini berkorelasi dengan respons-respons yang dilakukan pada Model Hourglass.



a. Deep Prevention

Deep prevention adalah pencegahan konflik kekerasan secara mendalam dengan menemukan akar penyebab konflik yang bisa disebabkan oleh persoalan ekonomi, kurangnya akses politik, atau diskriminasi terhadap suatu kelompok. Apabila ada pembangunan ekonomi yang sesuai, institusi sah, dan adanya budaya

⁷⁰ [From the starts, it has been a central purpose of conflict resolution to seek to prevent violent conflict] Oliver Ramsbotham., 123.

⁷¹ Ramsbotham et al., 123.

⁷² Ibid., 126.

⁷³ Ibid., 125.

toleransi, maka perang dapat dicegah.⁷⁴ *Deep Prevention* menekankan pada hubungan dan kepentingan pihak yang berkonflik atas konflik tersebut baik dalam tatanan domestik, regional, atau internasional dengan tujuan mengurangi timbulnya konflik.⁷⁵ Akar konflik di sebuah negara biasanya disebabkan oleh pengelolaan sumber daya yang kurang baik, ideologi negara yang berbeda dengan kultur masyarakatnya, serta hubungan yang kurang baik antara individu atau kelompok dengan komunitas politik negara tersebut. Pada dasarnya, jika ada kesepahaman antara komunitas politik dengan masyarakat, kemudian ketersediaan infrastruktur publik yang memadai, serta adanya nilai-nilai yang bisa diterima oleh masyarakat, sesungguhnya konflik-konflik kekerasan tersebut bisa dihindari. Namun, ketika pemerintahan dijalankan dengan paksaan dan sumber daya dialokasikan dengan tidak merata maka tak jarang konflik kekerasan akan terjadi.⁷⁶

Dari pemaparan Ramsbotham tersebut, ditarik premis bahwa *deep prevention* dimaksudkan untuk mencegah konflik secara mendalam dengan menciptakan tata pemerintahan yang baik untuk semua pihak yang mungkin akan berkonflik. Hal ini membentuk keterhubungan *deep prevention* dengan Model Hourglass, khususnya pada kolom ketiga. Pada kolom ketiga terdapat *cultural peacebuilding* yang dilakukan dengan mengupayakan pencarian fakta. Pencarian fakta secara langsung tentang konflik yang berlangsung sejalan dengan gagasan Ramsbotham bahwa *deep prevention* dilakukan dengan cara mencari akar konflik. Kemudian, *structural peacebuilding* dilakukan dengan mengupayakan pembangunan masyarakat. Hal ini sesuai dengan orientasi *deep prevention*

⁷⁴ Ibid., 125.

⁷⁵ Ibid., 129.

⁷⁶ Ibid., 129.

selanjutnya yaitu menciptakan pemerintahan yang baik untuk semua pihak. Hal ini akan berguna untuk melihat apakah OKI memberikan respons berupa *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding* ketika memahami *difference* dan *contradiction* pada konflik dengan berorientasi pada pencegahan yang mendalam.

Untuk mengukur apakah orientasi OKI adalah mencegah secara mendalam terulangnya konflik kekerasan di Thailand Selatan adalah dengan menguji indikator yang diberikan oleh Ramsbotham mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh preventer terkait akar permasalahan konflik. Berikut tabel yang akan menjelaskan tindakan yang dapat diambil oleh *preventer* dalam menghadapi sebuah konflik.⁷⁷

Tabel 1.1: *Preventers of Intrastate Conflict*

Factor generating conflict	Possible preventers
<i>State Level</i>	
Ethnic stratification	Power-sharing/federalism/autonomy
Human right abuse	Rule of law, human rights monitoring/protection

Sumber : Ramsbotham, dkk, 2012

Terlihat pada tabel di atas, bagian kiri memaparkan beberapa permasalahan umum suatu negara dan bagian kanan merupakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat disarankan oleh para *preventer*. Pada permasalahan etnis, *preventer* bisa menyarankan antara pihak yang berkonflik untuk mendapatkan kuasa yang sama dan berimbang. Tidak ada pihak yang mendominasi antara kelompok tersebut sehingga tercipta suatu pembagian kekuasaan (*power-sharing*). Atau juga bisa pemerintah memberikan otonomi

⁷⁷ Ibid., 133.

khusus kepada daerah yang berkonflik. Dan faktor umum yang terakhir adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok tertentu. Disini, upaya yang bisa dilakukan oleh pihak *preventer* adalah membantu membentuk hukum tertentu, serta memonitor dan melindungi hak asasi kelompok tersebut.

b. *Light Prevention*

Light Prevention merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan ketika konflik sedang mendekati konflik kekerasan dengan melakukan mediasi dan manajemen krisis.⁷⁸ *Light prevention* sering juga disebut dengan “*preventive diplomacy*” sebab dalam pelaksanaannya *preventer* menyelenggarakan usaha diplomasi, baik itu secara resmi seperti: mediasi, konsiliasi, mengadakan konferensi, serta membentuk pusat pencegahan konflik, maupun secara tidak resmi yang meliputi mediasi secara pribadi dan mengadakan dialog tertutup.⁷⁹

Keterhubungan *light prevention* dengan Model Hourglass dapat dilihat dari kesesuaian bentuk respons pada model tersebut dengan tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh *preventer* agar *light prevention* tercapai. *Elite peacemaking* yang ditunjukkan oleh pengiriman duta khusus, mediasi, dan negosiasi, sesuai dengan upaya diplomasi *preventer* dalam *light prevention*. Sedangkan *peacekeeping* yang bertujuan untuk memonitoring konflik berkorelasi dengan upaya manajemen krisis yang diupayakan *preventer* dalam *light prevention*.

Komponen *light prevention* di atas berguna untuk melihat apakah dalam merespons konflik Thailand Selatan dengan *elite peacemaking* dan *peacekeeping*,

⁷⁸ Ibid., 125.

⁷⁹ Ibid., 135.

OKI bermaksud pula untuk mencegah secara ringan konflik kekerasan di Thailand Selatan tidak terulang kembali.

Dalam pelaksanaannya, baik *deep prevention* maupun *light prevention* bisa tercapai ataupun tidak. Apabila *deep prevention* berhasil dicapai, maka perdamaian konflik yang terjadi pun akan mengalami penurunan dan mengarah ke kondisi yang damai. Jika gagal, konflik pun akan semakin meluas. Sedangkan *light prevention* apabila tercapai akan mampu menghindari konflik bersenjata yang baru dan lebih masif, namun jika gagal dicapai, akan terjadi konflik bersenjata yang baru.⁸⁰

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁸¹

1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melihat tindakan-tindakan atau upaya yang dilakukan oleh OKI terkait dengan konflik Thailand Selatan dari tahun 2005 hingga 2015. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, tahun 2005 menjadi awal bagi upaya panjang OKI dalam

⁸⁰ Ibid., 144.

⁸¹ Steven J. Taylor dan Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research: Research Methods: the Search for Meaning* (New York: Wiley & Sons Inc. , 1984), 5.

menyelesaikan konflik Thailand Selatan dengan mengundang kedua belah pihak yang berkonflik.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis (variabel dependen) merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan dianalisis. Variabel ini merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari variabel lain.⁸² Variabel yang dapat mempengaruhi unit analisa (variabel dependen) disebut sebagai unit eksplanasi (variabel independen). Variabel independen lebih dahulu terjadi daripada variabel dependen. Secara umum variabel independen disebut sebagai variabel penyebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat.⁸³ Tingkat analisis merupakan area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisis dalam penelitian ini akan ditekankan.⁸⁴ Dari penjelasan tersebut, yang menjadi unit analisisnya adalah strategi resolusi konflik Organisasi Kerjasama Internasional (OKI) dan unit eksplanasinya adalah dinamika konflik Thailand Selatan. Sedangkan tingkat analisisnya adalah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan tidak kaku.⁸⁵ Di dalam penelitian kualitatif, tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dianggap sebagai pekerjaan yang berkesinambungan dan dilakukan

⁸²Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 108.

⁸³ Ibid., 108

⁸⁴ Ibid., 35

⁸⁵ Emy Susanti Hendrarso, 168-169.

secara bersamaan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Peneliti tidak harus menunggu seluruh data terkumpul baru kemudian diolah dan dianalisis. Melainkan data dapat diolah dan dianalisis selagi data masih dikumpulkan. Peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi di tengah pengolahan dan analisis data sesuai dengan kebutuhan.⁸⁶

Terdapat tiga bentuk umum pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu: 1) Melakukan wawancara mendalam dan terbuka. Di sini data dapat berupa kutipan-kutipan. 2) Melakukan observasi langsung, yaitu dengan mengamati langsung tingkah laku objek penelitian. 3) Menelaah dokumen tertulis. Di sini data dapat berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; atau berupa memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei.⁸⁷

Dalam penelitian ini, data yang berhasil ditemukan berupa dokumen tertulis baik itu data primer maupun data sekunder. Adapun data primer, berupa *Press Release*, Piagam OKI, dan Resolusi-resolusi yang dikeluarkan OKI terkait dengan konflik Thailand Selatan. Sedangkan data sekunder, berupa hasil penelitian orang lain, buku, dan berita-berita baik dari Thailand, maupun Thailand Selatan.

Data juga dapat diolah dengan mengklasifikasikan atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.⁸⁸ Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data-data tentang OKI, mulai profil mendalam OKI,

⁸⁶ Ibid., 172.

⁸⁷ Dede Oetomo, "Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema" dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, 186.

⁸⁸ Emy Susanti Hendrarso, 173.

keterlibatan OKI dalam resolusi konflik, dan terakhir melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OKI dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan. Di sini peneliti dibantu oleh konsep dan model yang digunakan dalam melihat strategi resolusi konflik OKI di Thailand Selatan dengan mengelompokkannya, apakah OKI melakukan *preventing*. Jika OKI memang benar melakukan *preventing*, maka jenis apakah *preventing* tersebut: *deep prevention* atau *light prevention*.

Setelah diolah dan dianalisis, penulis dapat menyajikan data hingga tercapai suatu premis umum, sesuai dengan logika induktif, mengenai apa yang telah dilakukan oleh OKI. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berbentuk uraian kata-kata atau deskripsi.⁸⁹

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian.

BAB II Pemetaan dan Analisis Fase Konflik Thailand Selatan

Bab ini berisi pengetahuan-pengetahuan yang menjelaskan eskalasi konflik Thailand Selatan.

BAB III Kerangka Kerja Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Resolusi Konflik Thailand Selatan

⁸⁹ Ibid., 173.

Bab ini berisi deskripsi pengetahuan mengenai OKI sebagai organisasi internasional, yang meliputi kerangka pencegahan konflik yang mereka adopsi serta bentuk mekanisme operasional resolusi konflik OKI.

BAB IV Analisis Strategi Resolusi Konflik OKI di Thailand

Bab ini berisi pemaparan dan analisis data mengenai strategi resolusi konflik yang dilakukan OKI di Thailand Selatan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.

